

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada mulanya, masuknya Indonesia sebagai anggota IMF tidak lepas dari tarikan kepentingan politik bebas aktif yang Indonesia anut. Presiden Soekarno memainkan peran non blok ditengah pertarungan kuasa antara Amerika dan Soviet yang semakin meningkat, peran tersebut dapat dimainkan dengan cantik oleh Soekarno dengan dukungan dari negara-negara dunia ketiga, namun kedua blok yang bertarung kuasa tersebut mendesak Soekarno untuk memilih satu diantara dua. Pada tanggal 24 Juli 1950, Indonesia mengajukan permintaan untuk menjadi anggota dari Dana dan Bank tersebut. Setelah 3 tahun yakni pada pertengahan 1953, akhirnya Indonesia diterima sebagai anggota dari kedua Badan itu, keanggotaan mana kemudian disahkan dengan Undang-undang No. 5 Tahun 1954 tertanggal 13 Januari 1954. Pada tahun 1962 delegasi IMF mengadakan kunjungan ke Indonesia untuk menawarkan proposal bantuan finansial dan kerjasama, setahun kemudian tepatnya pada bulan maret 1963 Amerika Serikat menyediakan utang sebesar US\$ 17 juta dan dalam dua bulan kemudian pemerintah Indonesia mengumumkan rangkaian kebijakan ekonomi baru (devaluasi rupiah, anggaran negara yang ketat dan pemotongan subsidi) yang selaras dengan resep kebijakan IMF.

Namun kehadiran IMF justru mengakibatkan bertambah parahnya ekonomi Indonesia, tidak lebih dari satu tahun terjadi pelarian modal (*capital flight*) keluar negeri besar-besaran yang menyebabkan pengangguran,

diperparah lagi dengan penurunan nilai tukar rupiah secara drastis. Pada akhir tahun 1998 lebih dari 50% penduduk Indonesia hidup dibawah garis kemiskinan. Salah satu resep kebijakan IMF untuk menutup 16 bank bermasalah membuat masyarakat panik dan menarik uangnya di bank-bank nasional dan sebagian di bank asing, untuk mengatasi goncangan ini IMF kembali membuat rekomendasi kebijakan yang mengharuskan pemerintah mengucurkan dana trilyunan rupiah untuk memperbaiki kecukupan modal pada bank-bank yang bermasalah tersebut melalui obligasi rekap.

Dalam perjanjian IMF dengan pemerintah menyatakan bahwa setelah pemerintah menyalurkan obligasi rekap kepada bank-bank yang kolaps, maka bank tersebut harus segera dijual kepada pihak swasta. Dengan demikian pemerintah juga terbebani kewajiban untuk membayar bunga dari obligasi tersebut. Sedangkan IMF memberi batasan waktu penjualan bank-bank tersebut yang mengakibatkan murahnya harga bank-bank tersebut, dan para pembeli domestik maupun asing masih menikmati bunga dari obligasi rekap yang lebih besar jumlahnya dari pada harga bank itu sendiri. Obligasi pemerintah yang melekat pada bank-bank bermasalah seluruhnya sebesar Rp. 430 trilyun dengan kewajiban membayar bunga Rp. 600 trilyun yang dibebankan kepada pemerintah.

Pada Mei 1998, karena kesepakatan antara IMF dan Soeharto, pemerintah mencabut subsidi bahan pokok dan menaikkan harga minyak dan listrik. Kebijakan ini menyulut penolakan keras dari rakyat dan tak lama kemudian Suharto jatuh. Hubungan IMF dan Indonesia terus berjalan dengan ditandai kesepakatan LOI -I sampai dengan IV sejak tahun 1997 sampai tahun 2003 pada

masa Megawati berkuasa, tepatnya pada agustus 2003 pemerintah akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan program bantuan IMF dan memilih untuk masuk dalam Post Program Monitoring (PPM). Pilihan Pemerintah ini menimbulkan konsekuensi yang tidak jauh beda dengan pada saat melainkan program kerjasama karena IMF masih dapat terus mendikte kebijakan ekonomi Indonesia. Masa intervensi IMF ini menghasilkan Inpres No. 5 tahun 2003 yang sering disebut inpres “white paper”. Inpres tersebut adalah produk kebijakan negara yang dilahirkan dari intervensi IMF maka tidak heran jika arah kebijakan ekonomi yang tertuang dalam inpres tersebut persis dengan kebijakan IMF meskipun dibuat oleh pemerintah Indonesia.¹

Dalam pidato pertanggungjawaban sebagai mandataris (mantan) Presiden Soeharto mengajukan upaya untuk melakukan apa saja untuk rakyat yang bertambah berat bebannya akibat krisis moneter pada saat ini. Kritik awal terhadap usulan program ini adalah program IMF plus, tetapi program ini tidak jelas sebagai komunikasi kebijakan pada publik, akibatnya komunikasi pemerintah dengan publik ataupun IMF sulit dibaca. Pada saat ini, pemerintah semestinya perlu mengambil jalan keluar untuk lepas dari masalah kurs yang sudah tidak masuk akal dengan menggelar kebijakan yang berani untuk memotong spekulasi dan berbagai gangguan atas sistem moneter kita. Pada saat yang sama,

1. Ersson, J. L. (1994). *Ekonomi Politik Komparatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

pemerintah juga hendak mengambil inisiatif untuk keluar dari krisis dengan kebijakan kurs tetap.

Persoalan Indonesia menjadi berganda ketika IMF justru menjadi factor krusial, yang mengagendakan beragam kepentingan. Jalan diplomasi ekonomi untuk memecahkan masalah nilai tukar terus diupayakan²

Dana Moneter Internasional (IMF) menilai kondisi perekonomian Indonesia masih positif. Dibandingkan dengan negara lain, IMF menyatakan perekonomian Indonesia masih berjalan dengan baik. “Banyak negara lain ingin belajar dari Indonesia,” kata Kepala Divisi IMF Departemen Asia dan Pasifik Luis Enrique Breuer saat bertemu awak media di Jakarta, Selasa, 14 November 2017. Luis menuturkan pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang oleh banyaknya jumlah populasi muda. Populasi muda ini, kata Luis, pada akhirnya akan memasuki pasar tenaga kerja setiap tahun. “Hal tersebut, pada akhirnya menciptakan potensi pertumbuhan.

Luis mengatakan Indonesia memiliki potensi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen sampai 6,5 persen dalam beberapa tahun ke depan. IMF sendiri memprediksi pertumbuhan Indonesia mencapai 5,3 persen tahun depan. Sedikit di bawah target pemerintah 5,4 persen. “Untuk mencapai pertumbuhan tersebut yang perlu dilakukan adalah menghasilkan

2. Rachbini, D. J. (2001). *Analisis Kritis Ekonomi Politik Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

lapangan kerja sehingga negara bisa mendapatkan keuntungan dari dividen demografis.

Selain membuka lapangan kerja yang lebih luas, pemerintah menurut Luis juga perlu melakukan beberapa pekerjaan rumah lainnya. Luis mengatakan pemerintah perlu menjaga disiplin finansial, tingkat inflasi dan stabilitas makro ekonomi. Kedua, Luis mengatakan pemerintah juga perlu meningkatkan kemampuan bereaksi terhadap faktor eksternal. Pemerintah, harus waspada terhadap beberapa faktor seperti pertumbuhan ekonomi global, pertumbuhan Cina dan suku bunga Amerika Serikat. Indonesia punya penyangga untuk merespon sesuatu yang salah terjadi dari luar. Baik bagi Indonesia jika harga minyak naik. Tapi buruk, jika terjadi perlambatan ekonomi Cina atau kenaikan cepat tingkat suku bunga AS.

Selain itu, Luis juga menyarankan agar pemerintah memodernisasi peraturan di Indonesia. Sebab, menurut Luis penerapan desentralisasi membutuhkan penyalarsan antara aturan pemerintah pusat dan daerah. Keempat, Luis mengatakan pemerintah harus meningkatkan pendidikan untuk populasi muda. Dan terakhir, Luis menyarankan agar pemerintah dapat membenahi sektor keuangan yang menurutnya tidak terlalu efisien. OJK (Otoritas Jasa Keuangan) terlalu banyak peraturan. Luis menuturkan Indonesia juga masih memiliki beberapa kendala untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Kendala tersebut di antaranya, ketergantungan yang berlebihan pada komoditas. Jika harga komoditas turun, pendapatan negara juga akan turun. Kendala lainnya adalah investasi pemerintah pada proyek infrastruktur yang butuh waktu lama untuk

mempengaruhi ekonomi. Menurut dia ada sejumlah resiko fiskal jika proyek tersebut mangkrak.

Namun IMF menganggap proyek infrastruktur juga penting sebab Indonesia tertinggal jauh dalam hal infrastruktur dibanding negara lain. “Dalam jangka pendek, proyek infrastruktur telah berdampak pada ekonomi melalui belanja pemerintah.”³

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas dapat di buat rumusan masalah, yaitu :

Faktor apayang menyebabkan Indonesia terpilih menjadi DC Chair (Development Committee) 2016-2017?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bahwa Indonesia memang layak terpilih menjadi DC Chair (Development Committee)

D. Manfaat Penelitian

Bagi Mahasiswa yaitu, mengetahui bahwa Indonesia walau negara berkembang memang layak terpilih menjadi DC Chair (Development Committee)

Bagi Instansi yaitu, menambah khasanah ilmu pengetahuan terkait bahwa Indonesia memang layak terpilih menjadi DC Chair (Development Committee)

³C, J. (2001). International Monetary Fund English. *IMF*, 10-17.

Bagi Masyarakat yaitu, mengetahui posisi perekonomian Indonesia di mata dunia.

E. KERANGKA TEORITIK

1. Kode Etik Kelembagaan Organisasi Internasional IMF

Menurut buku pedoman tentang IMF “Apakah Dana Moneter Internasional itu?” menjelaskan kode etik dalam IMF yang mengutarakan bahwa negara dapat meyakinkan komunitas internasional tentang kebijakan dan praktek mereka dengan mengikuti standar dan kode praktek yang baik yang diterima secara internasional. Untuk negara yang tidak melakukannya, standar dan kode internasional berlaku sebagai panduan untuk memperkuat sistem mereka. IMF telah bekerja untuk mengembangkan dan menyempurnakan standar volunter di bidang yang merupakan tanggung jawab IMF dalam kasus tertentu bekerja sama dengan organisasi internasional lainnya, seperti Bank untuk Setelmen setelmen Internasional (*Bankfor International Settlements—BIS*) dan Bank Dunia. Ini termasuk standar yang terkait dengan suatu praktek statistik negara; kode praktek yang baik dalam kebijakan fiskal, moneter, dan keuangan; dan panduan mengenai memperkuat sektor keuangan seperti standar regulator dan pengawasan sistem perbankan. Bekerja sama dengan IMF sudah merupakan usaha BIS, Bank Dunia, dan badan penentuan standar, yang sampai sekarang sedang mengerjakan standar internasional di beberapa bidang seperti, akuntansi dan audit, kebangkrutan, corporate governance, regulasi keamanan pasar dan sistem

setelmen dan pembayaran. Untuk membantu negara menilai kepatuhan mereka sendiri, staf IMF, sesuai dengan pemerintah yang bersangkutan pada tahun 1999 mulaimenyiapkan laporan negara yang bersifat eksperimental tentang observasi negara akan standar dan kode, memfokuskan terutama pada bidang operasional langsung yang bersangkutan dengan IMF. Beberapa negara telah memilih untuk mempublikasikan laporan tersebut.

Pengawasan negara dalam bentuk konsultasi komprehensif teratur (biasanya tahunan) dengan negara anggotasecara individu tentang kebijakan-kebijakan ekonomimereka dengan diskusi interim seperlunya.Konsultasitersebut disebut “Article IV Consultations” karenadimandatkan oleh Pasal IV piagamIMF. (Mereka juga disebut konsultasi“bilateral”, tetapi ungkapan tersebutpada kenyataannya adalah salah ketika IMF mengadakan konsultasi dengan suatu negara anggota, IMF mewakili seluruh keanggotaan, sehingga konsultasi sungguh selalu multilateral.)

North & Thomas (1973) mendefinisikan institusi sebagai : institusi berperan dalam mengatur bagaimana unit-unit ekonomi melakukan kerjasama atau berkompetisi satu sama lainnya. Selain itu, bagi North kelembagaan adalah aturan-aturan atau norma-norma yang tercipta dalam masyarakat yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, mana tugas dan kewajiban yang harus dilakukan atau tidak dilakukan.

Dari uraian di atas, jelas bahwa dalam membicarakan institusi, pandangan North institusi

adalah peraturan perundang-undangan berikut sifat-sifat memaksa (enforcement) dari peraturan-peraturan tersebut serta norma-norma perilaku yang membentuk interaksi antara manusia secara berulang-ulang. Hal yang sama berlaku dalam dunia ekonomi dan bisnis, di mana ada aturan main yang mengoordinasi aktivitas-aktivitas ekonomi. Bagaimana kelembagaan dapat mengurangi unsure ketidakpastian dalam ekonomi dan bisnis, menurut North (1994) menjelaskan bahwa adanya institusi yang baik akan dapat menyelesaikan masalah koordinasi dan produktisi, sebab masalah koordinasi dan produksi terkait dengan motivasi para aktor, lingkungan dan kemampuan pemain dalam menjinakkan lingkungan.⁴

Dan dari buku “Administrasi dan Organisasi Internasional” mengungkapkan Status Hukum Organisasi Ekonomi Internasional secara umum mengandung personality hukum negara-negara yang bersangkutan. Kepribadian atau ciri khusus hukum memungkinkan mereka menjalankan seperti hukum yang ada antara keduanya dalam lingkungan hukum internasional dan dalam lingkungan mereka sendiri. Seperti diketahui, organisasi internasional terikat dalam kegiatan-kegiatan yang memberi syarat kepada mereka untuk memiliki ciri atas tanda dari kepribadian internasional dan hal ini merupakan bagian suatu hal yang penting dari implementasi perjanjian yang diperhatikan. Oleh karena itu, kepribadian hukum merupakan suatu ciri yang penting

⁴Clift, J. (2001). *Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund)*. USA: Seksi Grafik IMF.

dalam menentukan objektivitas dari apa yang dibentuk oleh organisasi-organisasi internasional. Ketentuan dari organisasi-organisasi internasional tertentu memiliki kemampuan untuk menunjukkan macam-macam fungsi, antara lain mencakup perjanjian-perjanjian (treaty), menciptakan perdamaian internasional, mengadakan konfirmasi internasional yang mewakili negara-negara dan organisasi-organisasi internasional, mengirimkan perwakilan diplomatik untuk menjadi anggota dan bukan merupakan anggota.⁵

2. Diplomasi

Kata “diplomasi” diyakini berasal dari kata Yunani “diploun” yang berarti “melipat”. Menurut Nicholson, “pada masa Kekaisaran Romawi semua paspor, yang melewati jalan milik Negara dan surat-surat jalan dicetak pada piringan logam double, dilipat dan dijahit jadi satu dalam cara yang khas. Surat jalan logam ini disebut “diplomas”. Selanjutnya kata ini berkembang, lama-kelamaan kata “diplomasi” menjadi dihubungkan dengan manajemen hubungan internasional.

Harold Nicholson, salah seorang pengkaji dan praktisi yang pandai dalam hal diplomasi di abad kedua puluh menegaskan bahwa dalam bahasa yang lebih mutakhir kata diplomasi secara gegabah diambil

⁵Rudy, M. T. (2005). *Administrasi dan Organisasi Internasional*. Bandung: PT Refika Aditama.

untuk menunjukkan paling tidak lima hal yang berbeda. Dari kelima hal tersebut empat hal yang pertama menyangkut: (1) politik luar negeri, (2) negosiasi (3) mekanisme pelaksanaan negosiasi (4) cabang dinas luar negeri. “Diplomasi, dalam hubungannya dengan politik internasional, adalah seni mengedepankan kepentingan suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain. Negosiasi yang dilaksanakan bagi kasus-kasus yang menonjol mempunyai tujuan diplomatik jangka panjang. Dalam mengkaji definisi-definisi yang telah disebut di atas, beberapa hal tampak jelas. Pertama, jelas bahwa unsur pokok diplomasi adalah negosiasi. Kedua, negosiasi dilakukan untuk mengedepankan kepentingan negara. Ketiga, tindakan-tindakan diplomatik diambil untuk menjaga dan memajukan kepentingan nasional sejauh mungkin bias dilaksanakan dengan sarana damai.

Tujuan utama diplomasi adalah pengamanan kebebasan politik dan integritas teritorial. Tujuan pokok dari diplomasi yang bermanfaat adalah untuk mencegah Negara-negara lain bergabung melawan suatu negara tertentu. Diplomasi sebagai sarana untuk mencapai damai dalam perang, fungsi utama diplomasi adalah negosiasi, tetapi mempunyai ruang lingkup menyelesaikan perbedaan dan menjamin kepentingan negara melalui negosiasi yang sukses.⁶

⁶Roy, S. L. (1995). *Diplomasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

F. Hipotesis

Adapun hipotesis penelitian ini berdasarkan rumusan masalah dan landasan teori yang sudah dipaparkan di atas adalah Indonesia berhasil menjadi Development Committee Chair sebab faktor pertama keberhasilan Indonesia melobby atau berdiplomasi dan kedua Indonesia memiliki ekonomi yang kuat.

G. Jangkauan Penelitian

Penelitian saya dari tahun 2016 sampai 2017

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah *deskriptif analitik* yang berusaha memusatkan perhatian kepada masalah kemudian mengumpulkan data maupun fakta-fakta dari beberapa dokumen tentang perspektif dan faktor terpilihnya Indonesia menjadi DC Chair (Development Committee).

Adapun analisis dalam riset ini merupakan induksi, dimana unit analisisnya merupakan negara yaitu Indonesia. Sementara Organisasi Internasional (IMF) merupakan unit eksplanasi yang menjadi alat untuk menjalinnya hubungan luar negeri yang multinasional.

I. Sistematika Penelitian

Penulisan penelitian ini secara keseluruhan terdiri dari 5 bab dengan pembahasan yang akan dijelaskan lebih rinci. Tulisan yang termuat dalam bab 1 sampai bab 5 saling berkaitan satu sama lain sehingga akan membentuk karya ilmiah yang sistematis, yaitu terdiri dari:

Di dalam bab I berisi tentang tulisan tentang alasan pemilihan judul penelitian atau arti penting penelitian, latar belakang masalah yang meliputi bergabungnya Indonesia ke dalam Organisasi Internasional IMF, rumusan masalah, landasan teori yang menggunakan teori kode etik kelembagaan dandiplomasi, hipotesis, metodologi penelitian dengan metode deskriptif analitik dan induktif, dan sistematika penulisan.

Bab II membahas tentang politik ekonomi Indonesia internasional, dinamika keterlibatan Indonesia di IMF, menguatnya peran Indonesia di IMF.

Bab III membahas mengenai diplomasi Indonesia juga membahas prestasi dan gaya Sri Mulyani melobby ini dan segudang penghargaan yang diarah merupakan wujud keberhasilan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai bahan pertimbangan IMF dan World Bank dengan Indonesia terpilih menjadi DC Chair spring meeting 2017.

Bab IV membahas tentang posisi perekonomian Indonesia di mata dunia.

Di dalam bab V berisi pembahasan akhir atau kesimpulan yang ditarik berdasarkan pembahasan yang ditulis dalam bab-bab sebelumnya berkaitan dengan bahwa memang layak Indonesia terpilih menjadi DC Chair spring meeting 2017 walau hanya dari Negara berkembang, melalui gaya lobby Menteri Keuangan RI, yaitu Sri Mulyani yang memang ia kuasai itu sebabnya sebagai bahan pertimbangan IMF-WB dan juga perekonomian Indonesia walau negara berkembang, masih banyak masalah ekonomi didalamnya tapi mampu menunjukkan yang terbaik dan ada kemajuan.

